

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA BIMA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu laporan yang akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mengevaluasi kegiatan yang telah direncanakan selama 1 Tahun Anggaran berjalan. Menyadari hal itu maka penyusunannya senantiasa melibatkan setiap level organisasi/bidang yang ada dan hasilnya telah disosialisasikan kepada masing-masing bidang sebagai penanggung jawab dari kegiatan yang ada maupun unsur organisasi lainnya guna mendapat masukan agar keberhasilan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2021 dapat dicapai secara maksimal.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima di masa mendatang.

Bima, 10 Februari 2022

Kepala Dinas Kominfotik



Drs. H. Sukri, M.Si

NIP. 19620323 198912 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	4
1.5. Lingkungan Strategis yang berpengaruh	7
1.6. Anggaran	9
1.7. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis	11
2.2. Rencana Kerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Keuangan	28
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN	
1 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin Diskominfo Kota Bima Tahun 2021	
2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
3 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
4 Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	

PENDAHULUAN

BAB

I

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Diskominfo dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-

undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKIP Diskominfo Kota Bima Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima adalah sebagai berikut:

- a) UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 adalah :

- a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya,
- b. Sebagai parameter penilaian kinerja OPD
- c. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik di komunikasi dan informasi,
- e. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja SKPD pada periode kerja selanjutnya
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya
- g. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.4. **Gambaran Umum Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bima Nomor 76 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bima.

Tugas :

Membantu Kepala Daerah dalam hal kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan desiminasi informatika, pengelolaan teknologi informatika dan komunikasi (TIK), persandian dan Statistik serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Penyusunan program kerja dan kegiatan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik bagi badan-badan publik instansi pemerintah daerah;
- f. Pembinaan penyelenggaraan sistem informasi elektronik yang aman yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Pengoordinasian Strategi Pengembangan Pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), Smartcity dan Government Chief Information Office (GCIO) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Pengoordinasian pembangunan jaringan komunikasi/ telekomunikasi dan pengamanan akses informasi guna memfasilitasi hubungan komunikasi antara perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah;

- i. Pengekoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan Program Pelayanan administrasi perizinan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan TIK dan Persandian serta tugas pembantuan;
- j. Penyelenggaraan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- k. Pengekoordinasian pembinaan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- l. Pengekoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi serta sistem informasi pemerintah daerah;
- m. Penyelenggaraan ketua harian PPID dan mengkoordinasikan pembinaan PPID di lingkungan Pemerintah Daerah;
- n. Penyelenggaraan pusat data terintegrasi lingkup Pemerintah Daerah dan infrastruktur pendukungnya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugasnya

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik *good governance* tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi *stakeholders*. Disamping itu, institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang

melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima dituntut untuk dapat mewujudkan *Smart City dan E-Governance* atau *Kepemerintahan yang baik*. Pengertian *Kepemerintahan yang baik (good governance)*, dapat diidentifikasi dengan indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN; 2000) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :

- *Participation* ; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- *Rule of law* ; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
- *Transparency* ; Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
- *Responsive* ; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stake holders.
- *Consensus Orientation* ; *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- *Equity* ; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- *Effectiveness and efficiency* ; Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- *Accountability* ; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Strategic vision ; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini

Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima mempunyai Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik.

1.5. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

1.5.1 Kondisi Geografis dan Kependudukan Kota Bima

Secara geografis Kota Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41'00"-118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"-8°30'00" Lintang Selatan. Tingkat curah hujan rata-rata 132,58 mm dengan hari hujan: rata-rata 10.08 hari/bulan. Sementara matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran rata-rata 21 °C sampai 30,8 °C. suhu tertinggi terjadi pada Bulan Oktober dengan suhu berkisar 37.2 °C sampai 38 °C. Luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 km² terdiri dari 5 Kecamatan dan 41 Kelurahan. Kondisi sosial masyarakat yang beragam juga menjadikan lingkungan strategis yang berpengaruh dalam penyelenggaraan urusan komunikasi, informasi dan persandian di Kota Bima.

1.5.2. Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Bima sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai yaitu 40 personil dengan tingkat pendidikan :

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. S-2 | : 8 orang |
| 2. S-1 | : 30 orang |
| 3. D-3 / Sarmud | : 1 orang |
| 4. SLTA | : 1 orang |

Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan, tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1
Keadaan Personil
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima
(Desember 2021)

NO.	ESELON	GOLONGAN (Orang)				STRATA PENDIDIKAN			
		IV	III	II	I	SLTA	DIII	S-1	S-2
1.	II	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	III	5	-	-	-	-	-	4	1
3.	IV	4	11	-	-	-	-	10	5
4.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Staf	-	18	1	-	1	1	16	1
J U M L A H		10	29	1	-	1	1	30	8

Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima adalah sebagai berikut :

- Eselon II/b : 1 jabatan
- Eselon III/a : 1 jabatan
- Eselon III/b : 4 jabatan
- Eselon IV/a : 15 jabatan

Gambaran tentang jabatan/eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel .2.
SDM Berdasarkan Eselonisasi

NO.	GOL./RUANG	ESELON					
		IV-b	IV-a	III-b	III-a	II-b	II-a
1.	IVc	-	-	-	-	1	-
2.	IVb	-	1	1	1	-	-
3.	IVa	-	3	3	-	-	-
4.	III d	-	6	-	-	-	-
5.	III c	-	5	-	-	-	-
6.	III b	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		0	15	4	1	1	-

1.5.3. Perlengkapan

Asset perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berupa sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Daftar Jenis Barang Pendukung Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Per 31 Desember 2021

No	Jenis Brang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda Empat	1
2.	Kendaraan Roda Dua	6
3.	Komputer	14
4.	Printer	13
5.	Laptop	16
6.	Internet	4
7.	Meja Kerja	26
8.	Kursi Kerja	30
9.	Filing Kabinet	13
10.	Ac	10
11.	Server	4

1.6 Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2021 Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik Kota Bima didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah tahun 2021 sebesar Rp 9.016.427.145,00,- Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 3.797.154.299,00,- Belanja langsung Rp 5.219.272.846,00,-.

Tabel 4
Jumlah Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Tahun 2020
Belanja Tidak Langsung	3.797.154.299,00	2.064.235.687,70
Belanja Langsung	5.219.272.846,00	12.649.682.900,00

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini merupakan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima selama Tahun 2021

yang dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2020 sehingga tercermin tingkat keberhasilan organisasi tahun 2021.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Lingkungan Strategis yang berpengaruh
- 1.6. Anggaran
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

- 2.1.1 Visi
- 2.1.2 Misi
- 2.1.3 Tujuan
- 2.1.4. Sasaran
- 2.1.5. Strategi Pencapaian
- 2.1.6. Kebijakan

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 20210

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2021 dengan Target Terakhir Rencana Strategis
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

2.1. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor - faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor- faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat visi , misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan stratejik tingkat PD berupa dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan stratejik tingkat kota berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023.

2.1.1 Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi Kota Bima tahun 2018 – 2023 adalah :

”Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan SETARA (Sejahtera, Transparan, Akuntabilitas, Ramah dan Agamais) menuju masyarakat maju dan mandiri”.

2.1.2 Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, Misi Pemerintah Kota Bima yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima 2018-2023, yaitu :

“Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik”

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah :

“Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

2.1.4 Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 dalam upaya menuju tercapainya visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik
3. Meningkatnya keamanan informasi daerah
4. Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi

Guna mengukur Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta target-targetnya, kami sajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	20%	50%	70%	85%	95%
2				Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	B	A	A	A	A
3				Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	40%	50%	60%	75%	95%
4				Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi	Presentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	-	-	85%	90%	95%

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2018-2023

2.1.5 Strategi

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bima maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi
2. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan pembangunan skala Kota
3. Peningkatan pelayanan persandian
4. Menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas

2.1.6 Kebijakan

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan, yang meliputi :

1. Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan publik administrasi
2. Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan)
3. Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan masyarakat kota terkait dengan program-program pembangunan
4. Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika
7. Meningkatkan data statistik sektoral.

Tabel 6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD

Visi : "Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan SETARA (Sejahtera, Transparan, Akuntabilitas, Ramah dan Agamais) menuju masyarakat maju dan mandiri".			
Misi 3 : Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan publik administrasi
			Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan)
	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan pembangunan skala	Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan masyarakat kota terkait dengan program-program pembangunan
			Menyediakan sarana dan saluran informasi

		Kota	publik melalui berbagai media
	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Peningkatan pelayanan persandian	Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika
	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi	Penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik
			Membangun dan mengintegrasikan sistem informasi statistik peningkatan data sektoral SKPD

Program yang diakomodir dalam Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima berjumlah 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Program / Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
	Layanan Hubungan Media
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3.1	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Membangun Metadata Statistik Sektoral
	Pengembangan Infrastruktur
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.2 RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menetapkan rencana kinerja sebagai berikut :

Tabel 8
Rencana Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Formula	Target
				2021
1.	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	Jumlah OPD yang mempunyai layanan SPBE / Jumlah OPD x 100%	70%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	Hasil Penilaian Kominsi Informasi Propinsi NTB	A
3	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	Jumlah Serangan yang Tertangani / Jumlah Serangan yang Masuk x 100%	60%
4	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Jumlah data sheet yang dikumpulkan / Jumlah seluruh data sheet x 100%	85%

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018-2023

Selanjutnya sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka rencana kinerja tahunan ditetapkan sebagai penetapan OPD dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 9
Penetapan Kinerja

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	70%
2.	Meningkatnya Kualitas	Predikat katagori A untuk PLID	A

	Layanan Informasi Publik Meningkatnya keamanan informasi daerah	Kota Bima Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	
3.	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	650%
4.	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	85%

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB

III

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra OPD

. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Oleh karena itu salah satu cara untuk mengukur Keberhasilan OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan mengukur capaian kinerja menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2021 sebagaimana tabel 10, sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	70%	70%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	A	A	100%
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	60%	60%	100 %
Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	85%	85%	100%

Berdasarkan tabel 10 diatas maka tingkat capaian target untuk empat Sasaran Strategis Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima tahun 2021 adalah 100% dengan kategori capaian sangat tinggi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD periode 2018-2023, data realisasi kinerja Tahun 2021 mempunyai indikator sasaran yang berbeda dengan tahun 2020, hal ini disebabkan adanya penggabungan dinas kominfo dan dinas statistik pada awal tahun 2021.

Adapun data pencapaian target dan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima tahun 2021

Tabel 11
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	70%	70%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	A	A	100,%
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi	60%	60%	100 %

	Daerah			
Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	85%	85%	100%

Tabel 12
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	50%	50%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	A	A	100%
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	50%	50%	100 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2021 dengan Target Terakhir Rencana Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima sampai Tahun 2021 dengan target terakhir rencana strategis sebagaimana tabel 13 berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Terakhir Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1.	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	95%	70%	73,68%
2.	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	A	A	100%
3.	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	95%	60%	63,16%
4.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	95%	85%	89,47%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Nasional

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2021 dengan target nasional, sebagaimana tabel 14 berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020
Dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi / Rata-Rata Nasional
1.	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	70%	
2.	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	A	
3.	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	60%	
4.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	85%	

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisa capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2021 disajikan sebagaimana tabel 15 berikut:

Tabel 15
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
1	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	70%	70%	100%
2	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	A	A	100%
3	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	60%	60%	100 %
4	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	85%	85%	100%

- **Indikator Kinerja 1.**

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2021 adalah 70% dari yang ditargetkan sebesar 70%. Dengan demikian diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian sangat tinggi.

1. Faktor pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi yang ada dilakukan oleh tim teknis yang sudah familier dengan aplikasi tersebut.

- Penyediaan bandwidth dan pemeliharaan jaringan komputer dapat berjalan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua karena sudah terencana dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu.

2. Analisis Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan sasaran IKU ini ditemukan permasalahan antara lain:

- Bentang geografis Kota Bima yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya
- Masih banyak kesenjangan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi
- Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika lingkup Pemerintah Kota Bima
- Masih adanya blankspot area di beberapa wilayah Kota Bima
- Belum adanya integrasi aplikasi pada semua SKPD teknis

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update baik melalui media cetak maupun media elektronik dan website.
- Bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan mengadakan pelatihan pengelolaan website.
- Bimbingan teknis pada operator SKPD dalam pengelolaan komunikasi dan informatika
- Mengajukan permohonan fasilitasi jaringan telekomunikasi untuk blankspot area di wilayah Kota Bima kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo.
- Di Tahun 2022 dilaksanakan integrasi aplikasi.

• Indikator Kinerja 2.

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2021 adalah A dari yang ditargetkan sebesar A. Dengan demikian diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian sangat tinggi.

1. Faktor pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Pengelolaan Website PLID yang sesuai dengan SOP.
- Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik antara SKPD terkait data yang dibutuhkan.
- Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua karena sudah terencana dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu.

2. Analisis Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan sasaran IKU ini ditemukan permasalahan antara lain:

- Belum optimalnya SDM pengelola website PLID Pembantu tiap-tiap SKPD.
- Masih banyak kesenjangan masyarakat dalam pengetahuannya tentang PLID

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- Bimbingan teknis pada operator SKPD dalam pengelolaan website PLID.
- Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update baik melalui media cetak maupun media elektronik dan website yang terkait PLID.

• Indikator Kinerja 3.

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2021 adalah 60% dari yang ditargetkan sebesar 60%. Dengan demikian diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian sangat tinggi.

1. Faktor pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Pengelolaan email sanapati yang sesuai SOP

- Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima terkait data kasus kebocoran informasi daerah.
- Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua karena sudah terencana dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu.

2. Analisis Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan sasaran IKU ini ditemukan permasalahan antara lain:

- Belum optimalnya SDM pengelola email sanapati.
- Belum adanya pejabat fungsional Sandiman

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- Bimbingan teknis pada operator pengelola email sanapati
- Mengirimkan ASN untuk mengikuti diklat sandiman.

• Indikator Kinerja 4.

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2021 adalah 85% dari yang ditargetkan sebesar 85%. Dengan demikian diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian sangat tinggi.

1. Faktor pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Pengelolaan Portal data online yang sesuai SOP
- Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik antara OPD pada Pemerintah Kota Bima terkait data statistik yang dibutuhkan.
- Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua karena sudah terencana dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu.

2. Analisis Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan sasaran IKU ini ditemukan permasalahan antara lain:

- Belum optimalnya SDM pengelola portal satu data.
- Belum adanya pejabat fungsional Statistisi

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- Bimbingan teknis pada operator pengelola portal satu data
- Mengirimkan ASN untuk mengikuti diklat Statistisi.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2021 meliputi:

a. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU Tahun 2021 sebesar 92,23%, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.016.427.145,00 dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 8.315.823.608,00 dengan demikian mengalami efisiensi sebesar Rp. 700.603.537,00.

b. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari:

- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengumpulan dan pengelolaan database daerah, sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan dengan real time sebelum pengiriman dokumen fisik.
- Dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat, dilakukan melalui aplikasi E-Lapor sehingga untuk masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kota dapat menghemat biaya dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, sekaligus langsung didistribusikan kepada SKPD terkait agar segera ditindaklanjuti.
- Dalam pengelolaan keamanan informasi dan persandian berbasis IT, menggunakan metode enkripsi yang dikembangkan sendiri pada semua aplikasi dan peralatan jaringan komputer. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan bila menggunakan pihak ketiga.

c. Sumberdaya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 40 ASN, 2 Orang Tebaga IT dan 39 Orang Tenaga Kontrak, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima dapat memperoleh capaian kinerja 100,00%. Hal ini dilakukan

antara lain dengan melaksanakan penambahan beban tugas dan jam kerja pegawai serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas, serta melibatkan tim teknis pada beberapa kegiatan. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan kondisi yang ideal bagi organisasi. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung akan menurunkan kinerja personil yang berdampak kepada menurunnya kinerja organisasi.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ini antara lain:

- Tersedianya ruang Data Center yang representatif dan nyaman serta berada dalam gedung yang sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan koordinasi. Adanya dukungan AC, SDM yang memadai, sehingga memudahkan untuk distribusi data dan internet .
- Adanya programmer yang selalu siap setiap saat bila dibutuhkan.
- Dukungan dari semua SKPD dalam implementasi tata kelola teknologi informasi.
- Antusiasme Tim Pengelola Informasi dan kelompok-kelompok informasi yang sudah dibentuk.
- Terjalannya kemitraan dengan media massa dan media online, yang membantu sebagian publikasi.
- Dukungan dari semua SKPD lingkup Pemkot Bima dalam publikasi melalui website dan interpersonal dapat membantu penyampaian informasi kepada masyarakat, meskipun publikasi melalui media cetak dan media luar ruang.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2021, kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.016.427.145,00 dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 8.315.823.608,00 atau sebesar 92,23%. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Dari target belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.797.154.299,00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima mampu merealisasikan sebesar Rp. 3.768.684.254,00 atau sebesar 99,25%. Adapun terkait belanja langsung, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.219.272.846,00 telah mampu direalisasikan sebesar Rp. 4.547.139.354,00 atau sebesar 87,12 %. Dengan demikian, presentase realisasi anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima terdiri dari 99,25 % belanja tidak langsung dan 87,12 % belanja langsung.

Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rekapitulasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	3.797.154.299,00	3.768.684.254,00	99,25
2	Belanja Langsung	5.219.272.846,00	4.547.139.354,00	87,12
Jumlah		9.016.427.145,00	8.315.823.608,00	92,23

Selama Tahun Anggaran 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima melaksanakan 4 (Empat) Program Utama dan 5 (lima) kegiatan utama dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/sub kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Utama	Target(Rp.)	Realisasi(Rp.)	%
1.	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.551.660.419,00	1.102.237.565,00	71,04
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.479.435.150,00	1.292.468.898,00	87,36

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Utama	Target(Rp.)	Realisasi(Rp.)	%
3	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	162.335.900,00	118.114683,00	72,76
4	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	184.659.000,00	145.777.300,00	78,94
Jumlah				3.378.090.469,00	2.658.598.446,00	78,70

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun Anggaran 2021, pagu anggaran pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan utama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima adalah sebesar Rp. 3.378.090.469,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.658.598.446,00 atau sebesar 78,70%.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan utama, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima juga menyelenggarakan program/ kegiatan/ sub kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada lampiran I.

PENUTUP

BAB

IV

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2021 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 dan Renstra Diskominfo Tahun 2018-2023.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama Tahun 2021.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja Tahun 2021 semuanya telah direalisasikan dengan baik kategori Berhasil dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 100%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 99,65%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2021 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Komunikasi dan Informasi pada Tahun 2021 telah berjalan dengan baik.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah

dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Diskominfo melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah permasalahan dan kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini merupakan tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu, secara umum organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima perlu memperkuat peran kelembagaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diupayakan diantaranya:

1. Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas antar bidang dan evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang baik.
2. Optimalisasi sistem perencanaan dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan sebagai upaya tersedianya data dan informasi yang cepat, akurat dan aktual serta kualitas analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Mengembangkan serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional perencana yang diharapkan akan dapat membawa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima menjadi institusi Komunikasi dan Informasi daerah yang kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.
4. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima.

Bima, 10 Februari 2022
Kepala Dinas Kominfotik



Drs. H. Sukri, M.Si
NIP. 19620323 198912 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BIMA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK					
	Urusan Pemerintahan : 2.10 Unit Organisasi : 2.10 . 2.10.01 Sub Unit Organisasi : 2.10 . 2.10.01 . 01					
4	PENDAPATAN DAERAH	197.284.000,00	0,00	187.738.000,00	187.738.000,00	(9.546.000,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	197.284.000,00	0,00	187.738.000,00	187.738.000,00	(9.546.000,00)
4.1.2	Retribusi Daerah	197.284.000,00	0,00	187.738.000,00	187.738.000,00	(9.546.000,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	197.284.000,00	0,00	187.738.000,00	187.738.000,00	(9.546.000,00)
5	BELANJA DAERAH	9.016.427.145,00	0,00	8.315.823.608,00	8.315.823.608,00	(700.603.537,00)
5.1	BELANJA OPERASI	7.727.759.995,00	0,00	7.432.929.118,00	7.432.929.118,00	(294.830.877,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	3.797.154.299,00	0,00	3.768.684.254,00	3.768.684.254,00	(28.470.045,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.646.474.295,00	0,00	2.631.439.975,00	2.631.439.975,00	(15.034.320,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	980.898.644,00	0,00	971.572.919,00	971.572.919,00	(9.325.725,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	169.781.360,00	0,00	165.671.360,00	165.671.360,00	(4.110.000,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.870.605.696,00	0,00	3.624.244.864,00	3.624.244.864,00	(246.360.832,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	563.509.650,00	0,00	434.665.800,00	434.665.800,00	(128.843.850,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	2.865.019.864,00	0,00	2.812.301.720,00	2.812.301.720,00	(52.718.144,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	111.009.700,00	0,00	64.541.193,00	64.541.193,00	(46.468.507,00)
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	331.066.482,00	0,00	312.736.151,00	312.736.151,00	(18.330.331,00)
5.1.5	Belanja Hibah	60.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	60.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	1.288.667.150,00	0,00	882.894.490,00	882.894.490,00	(405.772.660,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.288.667.150,00	0,00	882.894.490,00	882.894.490,00	(405.772.660,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	679.100.000,00	0,00	277.115.000,00	277.115.000,00	(401.985.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	609.567.150,00	0,00	605.779.490,00	605.779.490,00	(3.787.660,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(8.819.143.145,00)	0,00	(8.128.085.608,00)	(8.128.085.608,00)	691.057.537,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.819.143.145,00)	0,00	(8.128.085.608,00)	(8.128.085.608,00)	691.057.537,00